

Selasa Legi, 27 Januari 2015



YVESTA PUTU AYU/BERNAS JOGJA

AKSI -- Para mahasiswa dan akademisi Muhammadiyah melakukan aksi damai mendukung KPK dalam kisruh KPK vs Polri di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (26/1).

Syafii Bersedia Masuk Tim Tujuh

JOGJA -- Sejarawan Prof Dr Ahmad "Buya" Syafii Maarif menyatakan, kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri merupakan cermin dari ketidakdewasaan partai politik (Parpo). Karenanya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) harus benar-benar tegas mengatasi kisruh tersebut.

"Partai politik harus segera siuman betul. Presiden juga harus benar-benar mencermati permasalahannya. Ketegasan itu perlu dan presiden harus gerak cepat," kata Buya usai aksi damai mendukung KPK di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (26/1).

>> KE HAL 6

Sambungan dari hal 1

Dalam aksi damai dukung KPK tersebut, selain Syafii, sejumlah tokoh Muhammadiyah juga hadir. Mereka di antaranya adalah Dr Chairil Anwar, Prof Abdul Munir Mulkan, Dr Said Tuhuleley, Ir Dasron Hamid MS dan Pimpinan Pusat Aisyiyah Noordjanah Djohantini.

Hadir pula sejumlah pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) seperti Rektor UMY, Rektor UMS, Rektor UAD, Ketua STIKES Aisyiyah, Rektor UM Magelang, Asosiasi Pascasarjana PTM, Asosiasi Fakultas Hukum PTM, Asosiasi Ilmu Pemerintahan PTM, Asosiasi Ilmu Ekonomi PTM, Asosiasi Ilmu Kedokteran PTM, Asosiasi Ilmu Keperawatan PTM, Asosiasi Ilmu Agama Islam PTM, Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris PTM dan Ortonom Muhammadiyah.

Bersedia

Syafii dalam kesempatan itu mengaku bersedia bila ditunjuk Jokowi untuk masuk Tim Tujuh sebagai tim independen yang membantu menyelesaikan kasus kisruh KPK dan Polri. Namun ia tidak mau dikecang dalam menyuarakan kebenaran.

Jika benar dimasukkan menjadi Tim Tujuh, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berjanji untuk mengata-

Syafii Bersedia

kan yang benar maupun yang busuk. Namun ia kembali memberi catatan untuk tidak diarahkan.

"Meski belum menerima SK-nya tapi saya setuju dengan langkah Presiden membentuk tim independen terdiri dari tujuh orang tokoh. Mereka orang-orang yang memiliki integritas. Langkah Presiden benar kali ini," tandasnya.

Terkait kemungkinan pembatalan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, Syafii menyerahkan keputusan ke tangan Jokowi. Masih banyak polisi bersih lainnya yang bisa dicalonkan.

"Namun perlu dibentuk semacam badan yang mengawasi KPK. Badan itu juga harus independen supaya KPK tidak terlalu powerful tanpa kontrol," tandasnya.

BW juga diminta tetap bekerja secara maksimal dalam memberantas korupsi. Para akademisi di Muhammadiyah selalu memberikan dukungan moral kepada KPK agar tetap terus melakukan pemberantasan korupsi sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah.

"Kami prihatin dengan rivalitas lembaga penegak hukum dan akhirnya justru menguntungkan para koruptor," ujarnya.

Gali kubur

Syafii menambahkan, bila kisruh antara KPK dan Polri

tidak segera diselesaikan, Indonesia akan hancur. Presiden harus tegas dalam menyelesaikan masalah ini.

"Kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada yang tidak benar ya harus dikritisi. Demikian pula dengan Polri, kalau ada yang salah harus dibenarkan," ucapnya.

Saat ini, lanjutnya, ada upaya pelemahan terhadap KPK. Kalau tidak segera diselesaikan negara ini akan hancur. "Indonesia akan gali kubur sendiri. Kalau Presiden mau mendengarkan ini dengan hati nuraninya, kita apresiasi betul. Muhammadiyah tetap amar ma'ruh nahi mungkar," tandasnya.

Noordjanah menambahkan, situasi panas KPK vs Polri disinyalir telah terjadi upaya melemahkan KPK, baik secara individu maupun secara kelembagaan dengan cara yang sistematis. Karenanya sebagai perempuan Muhammadiyah, ia menyatakan sikapnya untuk memberikan dukungan penuh kepada KPK agar fokus terhadap pemberantasan korupsi.

"Sebagai perempuan Muhammadiyah, kami menyatakan sikap terhadap seluruh kriminalisasi yang dilakukan oleh siapapun dalam bentuk apapun, khususnya kepada KPK dengan sungguh-sungguh memberantas korupsi," ucapnya.

(ptu)